

KONSELING TIGA DIMENSI; Ide dan Praktik Ekologi Perkembangan dalam Memahami Problem Klien dan Komunitas

Oleh Fathur Rahman

Beberapa waktu yang lalu, jagat pendidikan di Indonesia pernah dikejutkan oleh *headline* surat kabar nasional dan lokal yang memberitakan terkuaknya beberapa kasus siswi hamil oleh teman pria di sekolah. Kasus-kasus tersebut pada akhirnya dipeti es-kan melalui keputusan sekolah yang mengeluarkan siswi tersebut dari sekolah dengan dua alasan utama, yakni tindakan siswi yang hamil di luar nikah dianggap mencemarkan nama baik sekolah dan upaya mempertahankan siswi dalam lingkungan sekolah diyakini akan menjadi preseden buruk serta faktor pengukuh terhadap munculnya fenomena serupa. Padahal, jika dianalisis lebih lanjut kebijakan mengeluarkan siswi hamil dari sekolah (bagi penulis) merupakan tindakan diskriminatif dan merefleksikan ketidakmampuan warga sekolah (termasuk pengambil kebijakan di sekolah) dalam memahami siswi hamil (klien), kasus yang dialaminya, dan konteks sosial seperti apa yang melatarbelakangi terjadinya kasus tersebut.

Dalam kasus seperti ini, terkadang kesadaran kritis kita menjadi tumpul dan cenderung digiring dalam cara berpikir yang mereduksi persoalan yang paling substansial. Kelemahan substansial dalam kasus ini adalah ketidakpekaan kita terhadap fenomena kekerasan seksual yang dilakukan oleh laki-laki yang sering berlindung di balik "topeng suka sama suka" dan hanya memahami kasus di kulit luarnya saja (*siswi dengan perut bunting merupakan aib bagi sekolah; supaya aib hilang, keluarkan saja si siswi dari sekolah. Habis perkara!*). Coba pahami kasus lebih dalam. Si siswi mengalami diskriminasi ganda; terdiskriminasi sebagai perempuan yang dianggap bersalah karena entah ia genit, berpakaian seronok dan terdiskriminasi haknya untuk memperbaiki diri dan mengakses pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pertanyaan yang perlu kita munculkan adalah sampai sejauh mana kesiapan dan peran konselor sekolah dalam menghadapi kasus-kasus rumit seperti ini?

Contoh diatas hanyalah fakta kecil tentang problem psikologis yang muncul di sekolah. Sekarang, coba kita alihkan fokus perhatian kita pada persoalan-persoalan yang muncul dalam masyarakat luas. Sebagai contoh adalah praktik rehabilitasi individual untuk penyandang cacat (difabel) yang dikembangkan oleh pemerintah selama ini. Pada mulanya, konsep rehabilitasi kecacatan diawali dari suatu konsep yang berorientasi pada kecacatan individual. Dalam konsep ini tujuan rehabilitasi adalah untuk melatih individu mencapai level aktivitas fungsional yang maksimal. Sistem konvensional atau yang lebih dikenal dengan rehabilitasi berbasis institusi (*institutional-based rehabilitation*) ini bekerja melalui mekanisme penempatan penyandang cacat dalam institusi yang memberikan pemenuhan makanan yang bergizi, tempat singgah dan berlindung (*shelter home*), pendidikan, dan beberapa pelatihan kerja tertentu. Bahkan, implementasi di Indonesia, para penyandang cacat diberi insentif modal untuk mengembangkan aktivitas kerja yang berorientasi profit,

contohnya praktik pijat yang dikelola oleh penyandang tuna netra (Fakih, 2004). Dalam perkembangannya kemudian, model ini memiliki beberapa kelemahan (Bierman, 1997). Oleh karena itu, Bierman (1997) menyimpulkan bahwa pendekatan rehabilitasi yang konvensional tersebut telah mengisolasi dan mensegregasi kebutuhan-kebutuhan substantif individu.

Walaupun pendekatan tersebut telah mengalami perubahan yang ditandai oleh pelibatan peran serta masyarakat, tetap saja pendekatan rehabilitasi terhadap difabel terkesan memaksa difabel agar mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat. Tuntutan penyesuaian diri difabel dengan kondisi normal masyarakat pada umumnya pada akhirnya telah menimbulkan ketidakseimbangan dalam relasi antara difabel dan masyarakat. Masyarakat menjadi tidak peka terhadap kebutuhan difabel sebagai komunitas khusus. Padahal, letak persoalan utamanya adalah bagaimana masyarakat itu sendiri mampu mengakomodasi kebutuhan difabel. Perlakuan masyarakat yang cenderung diskriminatif seperti tampak pada perlakuan terhadap komunitas difabel (orang dengan cacat fisik) dan minimnya fasilitas umum dan sosial untuk mereka. Belakangan ini di beberapa media massa kalangan difabel melakukan unjuk rasa terhadap beberapa pemerintahan daerah tertentu karena dianggap telah melakukan diskriminasi dalam proses rekrutmen calon pegawai negeri sipil. Hanya karena hambatan fisik seringkali kalangan difabel dianggap tidak mampu menyelesaikan tugas-tugas yang sama dengan individu normal.

Dengan demikian, salah satu kendala serius yang sering dihadapi oleh pemerintah dan aktivis sosial kemasyarakatan dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah ketidakajegan hasil antara perubahan yang dicapai oleh individu dengan dukungan kondusif yang tersedia dalam masyarakat (lingkungan sosial) individu yang bersangkutan. Begitu pula halnya dalam setting persekolahan. Hasil capaian di tingkat individu (siswa) terkadang tidak sejalan dengan perubahan pada budaya dan populasi sekolah secara keseluruhan. Sebagai contoh, kita sering melihat dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat, di satu sisi program-program yang bersifat individual menunjukkan perolehan capaian yang signifikan, namun di sisi lain, lingkungan sosial (masyarakat) yang menjadi ruang hidup individu ternyata tidak berkembang sejalan dengan perubahan individu. Atau bahkan seringkali terjadi suatu kondisi di mana individu dan lingkungan sosial telah berdaya, tetapi struktur sosial-politik, kebijakan, dan sistem yang lebih luas justru belum mampu mengakomodasi hak dan kebutuhan-kebutuhan publik. Dampak dari fenomena tersebut akhirnya hanya menghasilkan program-program pemberdayaan (baca; layanan bimbingan dan konseling) yang tidak jelas kebermanfaatannya dan tidak memiliki daya sustainabilitas (keberlanjutan) yang tinggi alias berhenti di tengah jalan.

Memahami dan Mengatasi Masalah Melalui Pendekatan Tiga Dimensi

Peletak dasar teori medan, Kurt Lewin, menyatakan secara tegas bahwa individu tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial dan lingkungan yang melekat dalam kehidupan sehari-hari. Secara matematis, ia menggambarkan bahwa perilaku merupakan perpaduan dua fungsi utama, yaitu organisme dan lingkungan

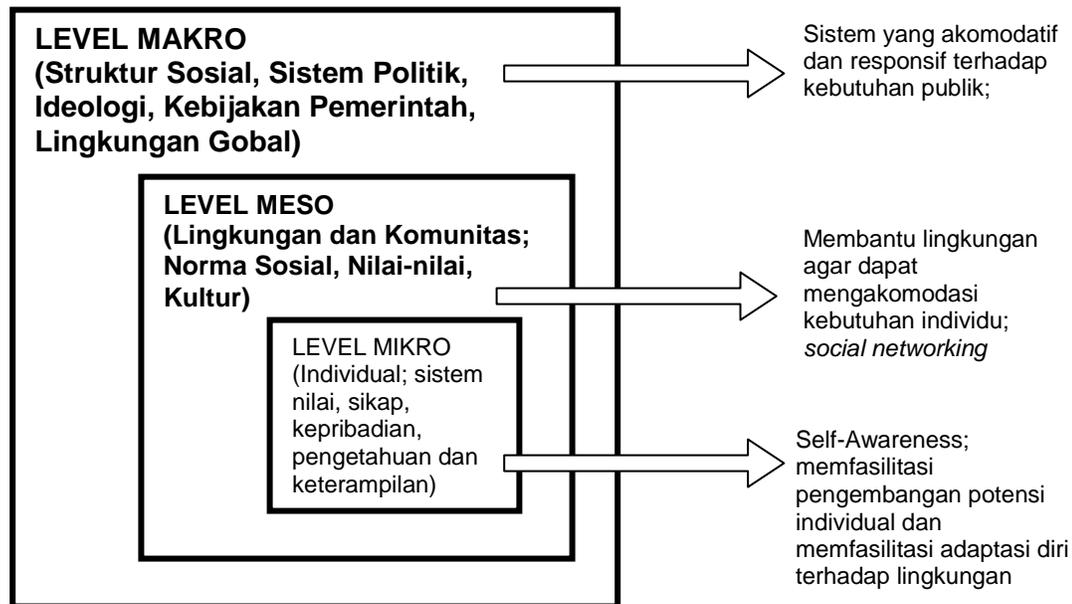
($B=f(O.E)$). Dalam perkembangannya kemudian, teori Lewin ini diadaptasi secara luas dalam bidang-bidang interdisipliner, seperti sosiologi pembangunan, psikologi kerja, psikologi sosial, dan lain-lain. Teori perkembangan dalam konteks (*theory of development-in-context*) atau ekologi perkembangan manusia (*the ecology of human development*) yang diperkenalkan oleh Urie Bronfenbrenner (Orford, 1992) juga diinspirasi oleh teori Lewin. Teori ekologi ini dapat dijadikan pijakan teoretis dalam menganalisis kebuntuan pemahaman dan pendekatan kita terhadap masalah individu dan relasinya dengan lingkungan. Bronfenbrenner (Orford, 1992) menjelaskan bahwa pada dasarnya sistem relasi antar pribadi terdiri dari empat dimensi, yaitu level mikro, meso, ekso, dan makro.

TINGKAT	RUANG LINGKUP
Micro-level	Individu memiliki pengalaman langsung (akses langsung) dalam ruang lingkup harian (seperti; rumah, sekolah, kelompok kerja, klub)
Meso-level	Sistem yang terdiri dari dua atau lebih level mikro dan memiliki saling keterkaitan (contoh; hubungan rumah-sekolah, rumah sakit-keluarga pasien, keluarga ayah-keluarga ibu setelah perceraian)
Exo-level	Hubungan antara level mikro dan meso dengan individu, tetapi individu yang bersangkutan tidak memiliki akses langsung terhadap level ini (Contoh; manajemen sekolah, lingkungan kerja orang tua)
Macro-level	Sistem dalam skala yang lebih besar; Sistem hubungan antara individu dengan level mikro, meso, dan ekso yang membentuk struktur sosial (Contoh; wacana gender dalam masyarakat, pola ideologi, perubahan sosial).

Lingkungan perkembangan manusia itu terdiri dari empat lapis perkembangan. *Pertama*, lapis mikro (*micro-level*), yakni hubungan atau pengalaman langsung individu dengan unit terkecil dalam masyarakat; bisa keluarga, sekolah, dan kelompok sebaya. *Kedua*, lapis meso (*meso-level*), yaitu keterkaitan dan hubungan langsung antara unit-unit mikro; relasi keluarga dan sekolah, relasi sekolah dan kelompok sebaya. *Ketiga*, lapis ekso (*exo-level*), yakni lingkungan di luar diri individu yang memiliki hubungan tak langsung. Contohnya, dunia industri. Lapisan yang keempat adalah level makro (*macro-level*) yang merupakan lapisan paling luar dari diri individu. Level ini dapat berupa struktur politik, sistem, ideologi, dan lingkungan global.

Untuk penjelasan yang lebih sederhana, teori ekologi perkembangan dapat dimodifikasi dan disederhanakan dalam tiga lapis perkembangan berikut ini, yaitu lapisan mikro, lapisan meso, dan lapisan makro. Lapisan mikro merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari si individu itu sendiri (pengetahuan, sikap, keterampilan, sistem nilai diri) dan keluarga. Lapisan meso adalah lapisan menengah yang di dalamnya terdapat masyarakat atau komunitas sekitar, lingkungan sekolah, kelompok sebaya lengkap dengan atribut yang dimilikinya, seperti sistem nilai, norma masyarakat, stereotip, stigma sosial, dan lain-lain. Sementara, lapis makro

merupakan lingkaran terluar dari diri individu dan masyarakat yang berhubungan tidak langsung, namun efek psikologisnya berpengaruh sangat besar terhadap perubahan-perubahan individu dan masyarakat. Tercakup dalam lapis makro tersebut seperti struktur politik, ideologi, lingkungan global. Penjelasan sederhana tentang keterkaitan individu dengan lingkungan sosial dapat diamati pada gambar skematis berikut ini:



Jika ketiga dimensi ini diterjemahkan dalam konteks tujuan konseling, maka pada dimensi mikro, konseling secara konservatif bertujuan membantu individu agar mampu menyesuaikan diri (beradaptasi) dalam lingkungan. Kegagalan kegiatan dan program konseling, baik di sekolah maupun di masyarakat selama ini disebabkan oleh aksentuasi yang berlebihan terhadap pencapaian tujuan konseling dalam dimensi mikro. Tidak mustahil yang terjadi justru kita memaksa klien untuk memperbaiki dirinya sesuai kehendak lingkungan dan norma-norma di sekelilingnya. Padahal, bisa jadi lingkungan (masyarakat) dan norma yang berkembang dalam masyarakat itu sendiri menyimpan kompleksitas problem yang jauh lebih berat ketimbang individu itu sendiri. Oleh karena itu kita perlu berhati-hati, alih-alih membantu individu yang terjadi bisa jadi "memaksa" individu mengikuti kehendak lingkungan yang tidak beres.

Pencapaian tujuan pada dimensi mikro tersebut perlu diperluas cakupannya sampai pada dimensi meso dan makro. Pada tataran meso, logikanya dibalik; konseling ditujukan untuk membantu lingkungan agar dapat mengakomodasi (memenuhi) kebutuhan dan hak-hak dasar individual. Fokus ubahan dalam dimensi ini bukan lagi individu sebagai klien, namun lingkungan dan masyarakat sekitar sebagai ruang hidup si individu. Pada dimensi yang lebih luas (dimensi makro), konseling diarahkan pada peran kelembagaan konseling untuk berpartisipasi aktif

dalam usaha-usaha mempengaruhi kebijakan publik yang mampu mengakomodasi kebutuhan komunitas dan individu yang ada di dalamnya.

Konsep ini sejalan dengan ide mencangkokkan pendekatan advokasi dalam program konseling perkembangan (Orford, 1992; Orto & Marinelli, 1995). Studi yang dilakukan oleh Williams (Orford, 1992; 248) adalah ilustrasi terbaik dari cikal bakal pendekatan advokasi dalam pengembangan komunitas. Dalam studi tersebut dijelaskan bahwa di Exeter, Inggris, sekelompok ahli yang sedang terlibat dalam pemberdayaan komunitas telah memfasilitasi komunitas untuk menemukan dan mengelola keinginan dan harapan mereka tentang masa depan dan bukannya mengidentifikasi problem dan mempreskripsikan intervensi perbaikan (*remedial treatment*) komunitas. Peran kelompok ahli ini kemudian beralih fungsi tidak lagi sekedar menjadi terapis bagi kelompok, tetapi juga mengembangkan keterampilan mendengarkan, sebagai analist, fasilitator kelompok, penyaji informasi, dan lain sebagainya.

Tema advokasi juga telah mewarnai periode kepemimpinan Loretta Bradley dalam Asosiasi Konseling Amerika selama kurun waktu satu tahun. Bradley (Kiselica & Robinson, 2001) di waktu itu sangat terkenal dengan jargon yang diusungnya, yaitu "*Advocacy; A Voice for Our Clients and Communities*". Tema advokasi yang diusungnya merefleksikan suatu ekspansi gerakan profesi bantuan konseling dari fokus tradisional yang sangat peduli pada faktor-faktor intrapsikis klien (mikro dan meso) menuju fokus baru yang lebih berorientasi pada pengaruh faktor-faktor ekstrasikis (exo dan makro) terhadap kesejahteraan psikologis klien (Kiselica & Robinson, 2001; Galassi & Akos, 2004).

Untuk memahami makna advokasi dalam konteks pendampingan psikologis, pengertian advokasi terhadap klien dan komunitas perlu dibedakan dari pemahaman advokasi secara umum (Galassi & Akos, 2004). Dalam pendampingan klien, advokasi merupakan suatu proses aktif yang didisain bagi lingkungan agar lebih responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan klien (Galassi & Akos, 2004; Orto & Marinelli, 1995). Sementara, pengertian advokasi dalam bentuknya yang umum dapat dipahami sebagai advokasi yang berbasis pada pendekatan sosial dan politik. Dalam pendekatan yang kedua ini, gerakan membantu (*helping profession*) diarahkan pada upaya-upaya peningkatan keterlibatan peran pendamping (konselor) dalam mempengaruhi kebijakan sistem sosial dan politik. Pada akhirnya, sistem ini dapat lebih responsive terhadap keseluruhan kebutuhan komunitas (Galassi & Akos, 2004). Keunikan aksi advokasi ini terletak pada perannya yang tidak hanya sebatas melakukan intervensi individual dan lingkungan klien semata-mata, tetapi juga advokasi berperan penting dalam mengimplementasikan pendampingan multisistem (Rahman, 2005). Intervensi yang diterapkan oleh konselor tidak lagi sebatas pada intervensi individual dan kelompok, namun advokasi sosial menuntut konselor untuk lebih mengembangkan intervensi organisasional dalam membantu klien keluar dari krisis hidupnya.

Seperti dijelaskan sebelumnya, tak jarang seorang konselor, misalnya, akan bersinggungan langsung dengan pendekatan struktural dalam mempengaruhi suatu kebijakan tertentu. Salah satu contoh pendekatan advokasi yang telah berhasil, seperti perjuangan aktivitas perempuan dalam memperjuangkan legislasi perundang-undangan penghapusan kekerasan domestik dalam rumah tangga (Rahman, 2005).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hakikat pendekatan advokasi terletak pada bagaimana keterkaitan individu dengan lingkungannya dan bagaimana hubungan timbal balik antara keduanya. Pendekatan ini menempatkan individu sebagai bagian dan satu kesatuan sistem dan subsistem yang tidak dapat terpisahkan. Fokus intervensi yang tersentral pada individu semata tidak membawa dampak yang signifikan bagi perubahan diri seseorang.

Lalu, apa yang perlu kita lakukan?

Kembali pada dua contoh kasus sebelumnya, apa yang dapat kita lakukan seandainya menghadapi situasi-situasi yang kompleks di sekolah maupun masyarakat. Pedoman praktis berikut dapat membantu konselor dalam mengembangkan kegiatan advokasi (Kiselica dan Robinson, 2001):

1. Jika klien adalah figur yang termarginalisasi, maka konselor berkewajiban memfasilitasi peningkatan akses informasi klien dari dan terhadap organisasinya
2. Konselor dapat berperan sebagai mediator bagi klien dan institusinya. Dalam konteks organisasi, konflik kepentingan rentan terjadi kapan saja. Oleh karena itu peran konselor sebagai mediator diharapkan dapat mengembangkan model resolusi konflik bagi dua kepentingan yang berbeda (klien dan organisasinya).
3. Konselor harus berusaha untuk meyakinkan agensi dan lembaga bahwa kliennya berhak mendapatkan layanan yang maksimal.
4. Konselor dituntut untuk memiliki keterampilan negosiasi dan lobbying untuk mendukung efektivitas perubahan kebijakan yang berdampak pada kualitas diri klien dan kelompok yang didampingi.

Sebagai kesimpulan, gagasan tentang urgensi pendekatan ekologis dalam implementasi layanan konseling bukanlah sesuatu yang baru. Namun, diseminasi ide pendekatan ekologis ini sangat sulit untuk diaktualisasikan secara nyata. Problem ini selain disebabkan oleh *mindset* "katak dalam tempurung", juga disebabkan oleh benturan-benturan kultural dalam masyarakat yang sulit mentransformasi dirinya sendiri. Di tingkat jurusan kita sendiri, gagasan ini jika perlu dijadikan landasan epistemologis bagi peta keilmuan bimbingan dan konseling. Sebagai contoh, beberapa mata kuliah seperti pemahaman individu teknik non tes perlu mengembangkan instrumen-instrumen yang bersifat sosial-interaktif; tidak lagi mengandalkan instrumen individual yang terkesan kaku, seperti wawancara, otobiografi, catatan harian. Untuk dapat mencapai pemahaman yang memadai tentang individu, konteks sosial harus dijadikan alat analisis utama (*tool of analysis*). Oleh karena itu, cobalah terapkan konseling tiga dimensi!

Wallahu a'lam bi assawab.

Yogyakarta, 15 September 2006

REFERENSI

- Bierman, D. (1997). *Disabled by Economic Transition?; An Analysis of Rehabilitation Services for Disabled People in the Context of Economic Transition in Vietnam*, Nijmegen: Catholic University of Nijmegen
- Dell Orto, A. E., & Marinelli, R. P. (1995). *Encyclopedia of Disability and Rehabilitation* (Eds.), New York: Simon & Schuster and Prentice Hall International
- Fakih, M., Topatimasang, R., & Rahardjo, T. (2001). *Pendidikan Populer; Membangun Kesadaran Kritis*, Yogyakarta: Read Book
- Galassi, J. P., & Akos, P. (2004). Developmental Advocacy: Twenty-First Century School Counseling, *Journal of Counseling & Development*, Vol. 82/Spring 2004, p. 146-157
- Kiselica, M. S., & Robinson, M. (2001). Bringing Advocacy Counseling to Life; The History, Issues, and Human Dramas of Social Justice Work in Counseling. *Journal of Counseling and Development*, Vol. 79, Fall 2001, p. 387-397
- Rahman, F. (2005). *Voluntarisme Sosial; Agenda Kerja Konseling Advokatif dalam Mengatasi Problem Ketidakseimbangan Sosial*, Paper dipresentasikan pada Konvensi Nasional XIV dan Kongres Nasional X Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia, Semarang 13-16 April 2005